

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 43–44.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2012), hlm. 148.
- Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework,” *Administration and Society*, Vol. 6, No. 4, 1975, hlm. 447.
- George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 11.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 213.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm. 20.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 241.
- Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, (New Jersey: Princeton University Press, 1980), hlm. 8–9.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 215.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 297.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 112.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 3, 5, 27, 67, 72.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 10, 52.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 29.

United Nations Development Programme (UNDP), Governance for Sustainable Human Development, (New York: UNDP, 1997), hlm. 9–10.

B. Jurnal

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework,” *Administration and Society*, Vol. 6, No. 4, 1975, hlm. 447. (Catatan: Hampir semua daftar pustaka Anda berupa buku dan dokumen resmi. Hanya referensi Van Meter & Van Horn yang masuk jurnal.

C. Peraturan Perundang-Undangan / Dokumen Resmi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Laporan Evaluasi Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Bengkulu, 2021, hlm. 38–42, 45.

Dinas Perdagangan Kota Bengkulu, Profil Pasar Panorama Kota Bengkulu, (Bengkulu: Dinas Perdagangan Kota Bengkulu, 2019), hlm. 7.

Hasil observasi peneliti di Pasar Panorama, Kota Bengkulu, Maret 2026.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Rakyat, (Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2015), hlm. 2–3.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Pengembangan dan Perlindungan Pasar Rakyat, (Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2017), hlm. 9, 12.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Pengembangan Pasar Rakyat di Indonesia, (Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2017), hlm. 5.

Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pasal 2, 5, 7, 8, 15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pasal 3.

Wawancara dengan Pengelola Pasar Panorama dan Pedagang, 10–18 Februari 2026.

L

A

M

P

I

R

A

N

